

**PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DI KABUPATEN PIDIE**

SRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

MUHAMMAD SYAUKHI

NPM: 1702110207



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD SYAUKHI
NPM : 1702110207

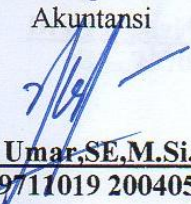
Dengan judul:

**PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DAN KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI
KABUPATEN PIDIE**

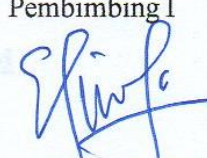
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


Alkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II


Fitri Yunina, SE, M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Irmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD SYAUKHI
NPM : 1702110207

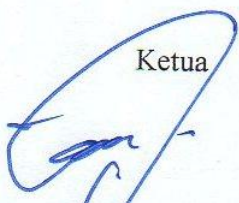
Dengan judul:

**PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DAN KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI
KABUPATEN PIDIE**

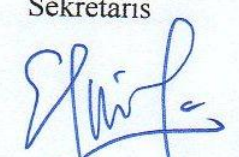
Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 06 Maret 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

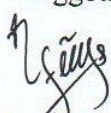
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

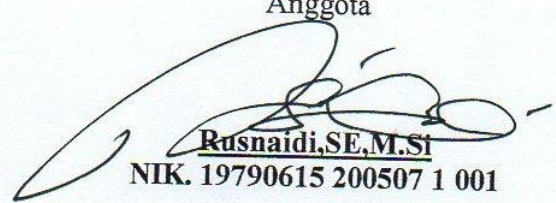
Sekretaris


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

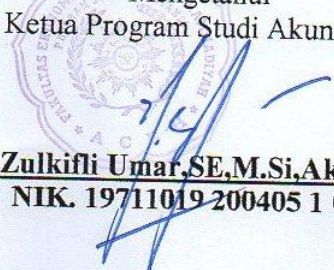
Anggota


Fitri Yunina, SE, M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Anggota


Rusnaldi, SE, M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 19 Maret 2022

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL

TF4B2AJX242181548

Muhammad syaukhi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad syaukhi
NPM : 1702110207
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KABUPATEN PIDIE

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Maret 2022



Yang Menyatakan,

Muhammad syaukhi

KATA PENGANTAR



Ungkapan rasa syukurku padaMu Ya Allah, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan kasih sayang, nikmat Islam dan Iman di jalanMu sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Inspektorat Dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kabupaten Pidie”** dapat terselesaikan dengan banyak kemudahan dan pertolongan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang Mulia Ayahanda dan ibunda tercinta atas segala doa, semangat, ridho dan kasih sayang yang selalu tercurah.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh beserta Staf Pengajar.
4. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Fitri Yunina, SE, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Aparatur Desa di Kabupaten Pidie yang telah berkenan mengisi kuesioner.
7. Spesial buat keluarga besar di Kabupaten Pidie yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh.
8. Buat sahabat-sahabat se-angkatan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lam.*

Banda Aceh, 9 Februari 2021
Penulis

Muhammad Syauki

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
ABSTRAK	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Mamfaat Praktis.....	10
1.4.2 Mamfaat Tioritis	10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 12
2.1 Landasan Teoritis	12
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa	12
2.1.1.1 Pengertian Keuangan Dana Desa	12
2.1.1.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	13
2.1.1.3 Azas dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa .	14
2.1.1.4 Indikator Pengelolaan Dana Desa	15
2.1.2 Pengawasan Inspektorat Daerah	16
2.1.2.1 Pengertian Pengawasan.....	16
2.1.2.2 Bentuk Pengawasan Pemerintah	17
2.1.2.3 Fungsi dan Kedudukan Inspektorat Daerah	19
2.1.2.4 Tujuan Pengawasan Inspektorat.....	21
2.1.2.5 Indikator Pengawasan Inspektorat Daerah.....	22
2.1.3 Kepemimpinan Kepala Desa.....	23
2.1.3.1 Pengertian Pimpinan.....	23
2.1.3.2 Perilaku Pimpinan.....	24
2.1.3.3 Peran Kepemimpinan.....	26
2.1.3.4 Indikator Kepemimpinan.....	27
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
2.4 Hipotesis	31
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 32
3.1 Desain Penelitia.....	32
3.1.1 Tujuan Penelitian	32
3.1.2 Jenis Penelitian.....	32
3.1.3 Horizon Waktu.	32

3.1.4 Unit Analisis.....	33
3.2 Populasi dan Sampel	33
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	35
3.5 Metode Analisis Data	37
3.6 Pengujian Data	38
3.6.1 Pengujian Validitas	38
3.6.2 Pengujian Reliabilitas.....	39
3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik	39
3.6.3.1 Uji Normalitas.....	40
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	40
3.6.3.3 Heteroskedastisitas.....	40
3.7 Pengujian Hipotesis.....	41
3.7.1 Uji Parsial (Uji t).....	41
3.7.2 Uji F	42
3.7.3 Koefisien Determinasi (R)	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie	42
4.2 Karakteristik Responden	42
4.3 Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
4.3.1 Variabel Pengawasan Inspektorat	43
4.3.2 Variabel Kepemimpinan Kepala Desa	46
4.3.3 Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	47
4.4 Hasil Pengujian Data.....	49
4.4.1 Pengujian Instrumen.....	49
1. Hasil Uji Validitas.....	49
2. Hasil Uji Reliabilitas	51
4.4.2 Uji Asumsi Klasik	52
1. Hasil Pengujian Normalitas.....	52
2. Multikolinearitas	53
3. Heteroskedastisitas.....	54
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.5.1 Koefisien Regresi	56
4.5.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi	56
4.5.3 Pengujian Hipotesis.....	58
4.5.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial	58
4.5.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Bersama	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	29
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	34
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	35
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel.....	36
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	42
Tabel 4.2 Gambaran Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Pidie	44
Tabel 4.3 Gambaran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan.....	46
Tabel 4.4 Gambaran Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pidie...	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	55
Tabel 4.9 Hasil Analisis Korelasi dan Determinasi	57
Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji T.....	58
Tabel 4.11 Hasil Analisis Uji F.....	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	52
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	54

**PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAN KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DI KABUPATEN PIDIE**

OLEH

NAMA : MUHAMMAD SYAUKI
NIM : 1702110207

Pembimbing :

1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
2. Fitri Yunina, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan inspektorat dan kepemimpinan kepala desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie. Populasi dalam penelitian seluruh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan di masing-masing desa di Kabupaten Pidie yang berjumlah sebanyak 44 aparatur atau masing-masing Desa mewakili 2 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling atau disebut dengan teknik sensus yaitu dengan mengambil seluruh populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner tertutup. Hasil penelitian dapat mengemukakan bahwa pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie dengan nilai koefisien regresi pengaruhnya sebesar 0,476 satuan. Kepemimpinan kepala Desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie dengan nilai koefisien regresi pengaruhnya sebesar 0,494 satuan. Nilai R sebesar 76,10% menjelaskan terdapat hubungan positif dan relatif sedang antara variabel pengawasan inspektorat dan kepemimpinan kepala Desa dengan pengelolaan keuangan dana desa aparatur desa di Kabupaten Pidie. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,579 menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 57,9%. Sedangkan sisanya 42,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kata kunci: **Pengawasan inspektorat, kepemimpinan kepala desa, pengelolaan keuangan dana desa**

BAB IS

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan agen pemerintah yang sangat dekat dengan berbagai bentuk aktivitas kehidupan masyarakat. Hadirnya Undang-undang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Desa serta diimplementasikannya berbagai bentuk peraturan yang mengatur pelaksanaannya, telah melahirkannya semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kini desa tidak lagi menjadi objek pembangunan nasional, namun merupakan subjek pembangunan nasional. Adanya kucuran dana desa yang begitu besar dari pemerintah pusat menjadi paradigma baru untuk mewujudkan kemandirian desa serta membangun desa sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakat. Seluruh kegiatan ini tentunya harus dilaksanakan melalui siklus pengelolaan keuangan dana desa yang terintegrasi dimulai dari tahap perencanaan dan penggaran, pelaksanaan dan penata usahaan anggaran, pengawasan anggaran hingga pertanggung jawaban anggaran.

Menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa, pengelolaan keuangan dana desa adalah seluruh tahapan kegiatan yang di mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga kegiatan pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip-prinsip yang baik akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan dana desa yang baik oleh aparatur desa harus selalu mempertimbangkan asas-asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dimana semua proses pengelolaan keuangan dana desa akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat sehingga dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan.

Pengelolaan keuangan dana desa yang mulai diimplementasikan tahun 2015 sejalan dengan dilaksanakannya program Dana desa oleh pemerintah pusat serta di diterapkannya bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa oleh pemerintah Kabupaten/Kota telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa termasuk masalah penanggulangan kemiskinan. Namun tidak dapat dipungkiri berbagai masalah telah timbul karena pengelolaan keuangan dana desa yang kurang baik dan mengancam kelangsungan program pembangunan desa. Menurut ICW, sejak tahun 2015-2019, sudah terdapat 900 kepala Desa terjerat dengan hukum karena masalah dalam pengelolaan dana desa. Pada tahun 2019 ada sebanyak 46 kasus korupsi anggaran dana desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai 32,3 miliar rupiah. Setidaknya ada sejumlah masalah yang membuat buruknya pengelolaan anggaran keuangan dana desa yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan hingga aspek SDM (Sholehah dan Parmin, 2021:2). Kondisi ini berpotensi terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pidie.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah di provinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kecamatan dan membawahi 730 Pemerintahan Gampong yang masing-masing dipimpin oleh geuchik gampong. Adapun anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pada tahun 2021 sebesar 524,72 miliar (Salman 2021). Akan tetapi, sejak dana APBD diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan daerah, ada beberapa desa yang mengalami masalah dalam pengelolaan dana tersebut, salah

satunya adalah Gampong Jeumpa, dimana sebagian hasil pembangunan tidak sesuai maupun setara dengan jumlah dana APBD yang disalurkan setiap tahun. Adapun anggaran itu kebanyakan digunakan untuk hal yang tidak terlalu penting dan juga tidak membuat masyarakat berubah dalam segi perekonomian. Disamping itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa tersebut yaitu kurangnya pengawasan dari kepala desa. Mada (2017) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa meliputi tiga aspek: komitmen organisasi, kompetensi aparat, dan partisipasi masyarakat. Menurut Subroto (2009), ada beberapa faktor utama yang menyebabkan hadirnya anggaran dana desa di setiap daerah. Yang pertama, desa memiliki APBD yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Yang kedua, Kesejahteraan masyarakat desa rendah. Selanjutnya, Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan yang terakhir adalah banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Sementara itu alasan memilih pengawasan inspektorat dan kepemimpinan adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah dan kepemimpinan Kepala Desa secara keseluruhan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie (Setiawan dkk 2020). Sejak diimplementasikannya program dana desa oleh pemerintah pusat tahun 2015, aparatur gampong di Kabupaten Pidie telah terlibat dengan pengelolaan keuangan dana desa secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, hingga pertanggung jawaban.

Menghadapi program pembangunan desa yang semakin prioritas dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin besarnya kucuran dana desa dari pemerintah pusat maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Pemerintah Kabupaten Pidie

membuat pengelolaan dana desa yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan melibatkan partisipatif masyarakat telah menjadi tuntutan semua pihak. Namun pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie sering di hadang oleh berbagai masalah. Masalah timbul dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan misalnya dimana rencana pembangunan desa masih didominasi oleh pemikiran kepala Desa dan Aparatur Gampong sehingga usulan kegiatan pembangunan yang direncanakan sering menyimpang dari usulan dari hasil musyawarah desa. Kondisi tersebut jugadi hambat oleh terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga perencana di Gampong sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya kurang dibutuhkan. Kemudian pada tahap pengawasan, banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap penggunaan dana desa, sehingga jika ada kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur desa sering kurang ditanggapi oleh masyarakat. Jika ada yang menanggapinya secara kritis hanya satu dan dua orang yang mungkin berasal dari pihak yang berlawanan pendapat dengan aparatur desa dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan demikian pengelolaan dana desa membutuhkan berbagai faktor pendukung termasuk di antaranya adalah pengawasan Inspektorat Daerah serta Kepemimpinan Kepala Desa yang berkualitas (Bustanil et al., 2020).

Pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie harus selalu diikuti oleh kegiatan pengawasan internal yang efektif dan berkualitas. Kegiatan tersebut melibatkan Inspektorat Kabupaten Pidie yang berfungsi sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Pidie. Keuangan desa yang bersumber dari dana desa, pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, sumber dana dari Alokasi Dana Desa serta dana transfer adalah

dana yang harus di pertanggung jawabkan secara hukum dan kebijakan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan ini tentunya dapat diwujudkan dengan melibatkan peran dan fungsi pengawasan internal yang di laksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Inspektorat daerah merupakan salah satu jenjang aparatur pengawasan daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pidie. Inspektorat daerah bertanggung jawab kepada Bupati. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengawasan. Inspektorat Kabupaten berfungsi melakukan perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian. Inspektorat Kabupaten Pidie mengawasi setiap kegiatan instansi-instansi, dinas-dinas ataupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menjalankan sistem administrasinya pemerintahan di Kabupaten Pidie, misalnya pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran desa dalam proses pelaksanaan keuangan desa, sertap prosedur pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan sesuai batasan waktu tertib administrasi.

Sebagai auditor internal pemerintah, Inspektorat daerah di Kabupaten Pidie memiliki kewenangan untuk melakukan yaitu; *Pertama*, pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, pencegahan terhadap kelalaian perangkat desa dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala Desa serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa. *Kedua*, pemeriksaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi keuangan dana desa dengan kriteria atau aturan-aturan yang

telah ditetapkan. Dalam melakukan fungsi pemeriksaan, Inspektorat Daerah juga harus dapat menemukan semua kesalahan yang material yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dana desa, baik kesalahan dalam penyajian informasi, pelanggaran terhadap prosedur-prosedur dan ketentuan akuntansi serta ketidaksesuaian penggunaan dana desa untuk program pembangunan sarana dan prasarana fisik, maupun pemberdayaan. *Ketiga*, pembinaanya itu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dana desa yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi. Ketiga fungsi tersebut jika dilaksanakan dengan baik maka akan membuat kualitas pengelolaan keuangan dana desa akan dapat terlaksana dengan baik.

Fungsi inilah yang menjadi dasar bahwa pengawasan inspektorat daerah menjadi sarana yang penting dalam menentukan pengelolaan keuangan dana desa secara efektif (Bustanil et al., 2020). Namun banyaknya jumlah gampong serta banyaknya jumlah objek yang berkaitan dengan penggunaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie yang harus diawasi oleh inspektorat daerah membuat tidak semua transaksi keuangan dana desa dapat ditelusuri kebenarannya secara efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Besarnya beban kerja dari jumlah auditor juga membuat kegiatan pemeriksaan dilaksanakan secara prioritas.

Kemudian kepemimpinan kepala Desa juga menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan terlaksananya pengelolaan keuangan dana desa secara efektif di Kabupaten Pidie (Wulandasari 2018). Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan *Geuchik Gampong* di Provinsi Aceh termasuk di Kabupaten Pidie adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Kepemimpinan kepala Desa merupakan suatu

proses dan upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi, petunjuk, perintah atau tindakan yang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu/bertindak, merespon dan menimbulkan perubahan kearah untuk mencapai tujuan tertentu (Dubrin , 2005 dalam Latif et al., 2020).

Kepala desa atau Geuchik Gampong adalah pemimpin formal masyarakat Gampong di Kabupaten Pidie yang memiliki kekuasaan yang besar di daerahnya. Diangkatnya seorang Kepala Desa oleh Bupati melalui sistem pemilihan langsung oleh masyarakat adalah untuk dapat menjembatani dan mengakomodir berbagai kepentingan dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Menurut Undang-undang 64 Tahun 2020 tentang Desa, kepala Desa yang dibantu perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut sejumlah kepala Desa di Kabupaten Pidie berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan proses kepemimpinan yang partisipasi dengan melibatkan peran bersama masyarakat. Selain itu kepala Desa juga bertugas mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, mengembangkan sumber pendapatan Desa serta melaksanakan sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Peran-peran tersebut sangat mempengaruhi terlaksanakannya pengelolaan dana desa sejak dari tahap perencanaan musyawarah desa, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban.

Selain itu kepala Desa juga memiliki tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Desa, meningkatkan perekonomian Desa dalam

skala produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Desa serta mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Kemudian kepala Desa juga ikut bertugas mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, serta tugas-tugas lainnya yang di limpahkan oleh pemerintah Kabupaten dan sesuai ketentuan undang-undang. Banyaknya tugas-tugas yang menjadi wewenang kepala Desa membuat kepemimpinan kepala Desa menjadi masalah yang penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik di desa.

Kepala Desa di Kabupaten Pidie mempunyai peran kepemimpinan yang multidimensional, karena selain sebagai pemangku jabatan kepala pemerintahan di Desa, kepala Desa juga lebih dekat dengan masyarakat. Walaupun pendidikan dan pengetahuan kepala desa di Kabupaten Pidie umumnya masih rendah, namun kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dengan sifat kepemimpinannya yang terbuka, kekeluargaan dan sebagai pengendali berbagai masalah yang terjadi di desa. di Desa telah terjadi berbagai sengketa, perselisihan dan konflik sosial yang memerlukan kehadiran kepala desa untuk menyelesaikannya, menguraikan serta menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat dalam tatanan hukum negara maupun hukum adat.

Salah satu peran dan tugas yang penting dan strategis yang dijalani oleh kepala Desa di Kabupaten Pidie sebagaimana di atur Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Untuk itu kepala Desa selain menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, juga harus mampu mengarahkan dan membimbing aparatur desa untuk dapat bekerja secara efektif dan penuh motivasi

sejak dari perencanaan musyawarah desa, pelaksanaan dan penata usahaan keuangan hingga pelaporan keuangan dana desa.

Untuk itu kepala desa juga harus dapat menyerap dan menerima (mendengar dan memahami) informasi dari berbagai pihak kemudian memberikan informasi secara terpercaya kepada masyarakat maupun kepada aparatur desa baik dalam tahap musyawarah desa maupun pada tahap pelaksanaan maupun pertanggung jawaban dana desa. Kepala Desa juga harus memiliki etika dan perilaku kepribadian yang baik dalam mengatur dan mengarahkan aparatur desa maupun masyarakat sehingga mereka dapat memberi dukungan sepenuh nya dalam pencapaian program kerja pemerintah desa. Namun tidak semua pimpinan di Kabupaten Pidie memiliki gaya kepemimpinan yang baik yang di wujudkan dalam bentuk gaya kepemimpinan partisipasi, demokrasi dan visioner. Namun justru pemilihan kepala desa yang berambisi besar justru sering melahirkan kepemimpinan yang otokratis dan transaksional. Kondisi ini akan mempengaruhi perilaku dan motivasi perangkat desa maupun masyarakat sehingga kemudian berdampak pada desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pidie”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengawasan Inspektorat Daerah dan kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.

2. Apakah pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.
3. Apakah kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah dan kepemimpinan Kepala Desa secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Kepala Desa secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Praktis

Berbagai manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dengan dukungan kepemimpinan kepala Desa.
- b. Dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam mengimplementasi teori akuntansi sektor publik dalam penerapannya di lapangan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Berbagai manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat melengkapi temuan empiris bagi penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.
- b. Penelitian dapat mengembangkan kemampuan fikir penulis dalam memahami faktor determinan pengelolaan keuangan dana desa akuntansi sektor publik dalam penerapannya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel pengawasan Inspektorat Daerah dan kepemimpinan Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan objek penelitian adalah aparatur desa di Kabupaten Pidie.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Hanif, 2011:81). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Soleh dan Heru (2015:81) keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dalam penjelasan undang-undang No 17 tahun 2003, dijelaskan sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan

hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa, menjelaskan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa terdiri dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

2.1.1.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban, dan pengawasan keuangan desa (Pasal 2, Permendagri No 20 Tahun 2018). Pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah suatu kajian tentang bagaimana sebuah organisasi memenuhi kebutuhan dananya dari berbagai alternative sumber dana, kemudian bagaimana organisasi tersebut menggunakan dana tersebut dan mengatur bentuk manfaat dana tersebut (Sudana, 2015:1).

Manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa menurut Nugroho dan Firre (2021:6) adalah kegiatan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang di atur dalam struktur keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan periodisasi satu tahun anggaran. Kemudian Caro (2015:5) menjelaskan pengelolaan keuangan dana desa adalah:

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota.

Dengan demikian pengelolana dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa sesuai dengan paraturan yang berlaku dalam bentuk hak dan kewajiban yang timbul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.1.3 Azas dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa, menjelaskan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pada Pasal 3 juga menjelaskan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggarannya kini mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa, dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

2.1.1.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa terdiri dari kegiatan meliputi:

- 1. Perencanaan
- 2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggung jawaban keuangan desa.

2.1.2 Pengawasan Inspektorat Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 23 Tahun 2007).

Menurut Murhaini (2014:3) jika dikaitkan dengan pengawasan aparatur pemerintah maka pengawasan adalah:

“tindakan aparatur pemerintah agar pelaksanaan kegiatan dan tugas yang ditetapkan data tercapai serta menghindari dari terjadinya penyimpangan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dikerjakan, dilaksanakan, atau diselenggarakan kemudian menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan memanfaatkan apa yang ada supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan pemerintah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintah. Menurut Henry Fayol dalam Arif *et al* (2016:548) pengawasan adalah “tindakan untuk menilai apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pasal 1 menyatakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian efektivitas pengawasan adalah sejauh mana keberhasilan para aparatur pengawasan pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan melalui proses pengawasan yang telah dilakukannya.

2.1.2.2 Bentuk Pengawasan Pemerintah

Kegiatan penilaian terhadap suatu fungsi pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyampaikan hasilnya pada DPR. Sementara itu pengawas internal dilakukan oleh inspektorat pada masing-masing departemen dan oleh badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) (Sumarsono, 2010:246).

Pengawasan menurut ruang lingkupnya menurut Soeradi (2012:36) dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal adalah sebagai berikut:

a. **Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Bila dirinci lebih lanjut, pengawasan internal dapat dipilah menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas. Menurut Endarjati dalam Abdul

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

Menurut Fahroji dan Mokh (2016:68) yang dimaksud dengan pengawasan Internal adalah Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal yaitu lembaga yang berada dalam struktur pemerintahan/eksekutif, pengawasan ini terdiri dari:

- a) Pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat juga berarti tindakan. Kegiatan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung. Yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi.
- b) Pengawasan Fungsional
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat oleh aparat pengawasan internal pemerintah secara fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas ini biasanya dilaksanakan oleh inspektorat.

Kemudian Mardiasmo (2013:217) menjelaskan pengawasan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi seperti yang dilakukan Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Wilayah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan internal menurut Sumarsono (2010:251) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah.

Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah merupakan tugas inspektorat. Menurut Pasal 1 PP No 60/2008 disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah:

1. Inspektorat jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
2. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
3. Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal (24), dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: *pertama*, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; *kedua*, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan ketiga, pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2.1.2.3 Fungsi dan Kedudukan Inspektorat Daerah

Pembinaan dan pengawasan instansi di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian yaitu BPKP, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Menurut Pasal 1 PP No 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa:

”Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Sementara Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/wali kota”.

Pengertian yang sama juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang mengatakan adalah:

1. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjelaskan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota mengatakan:

1. Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

2. Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Tugas Inspektorat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota mengatakan adalah:

- a. Menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan;
- b. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Menyelenggarakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pendapat yang sama menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjelaskan sebagai berikut:

1. Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kotamem punya tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

2.1.2.4 Tujuan Pengawasan Inspektorat

Pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Menurut Mockler dalam buku Gilbert *et al.* yang dikutip Tisnawati dan Saefullah (2014:128), fungsi pengawasan adalah:

Fungsi pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dari berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen termasuk pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sementara tujuan pengawasan menurut Sumarsono (2010:246) adalah sebagai berikut:

Untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika kemudian ditemukan penyimpangan maka hambatan tersebut dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi.

2.1.2.5 Indikator Pengawasan Inspektorat Daerah

Pendapat Sarwoto (2010: 28) dalam Agensyah et al. (2016), pengawasan yang efektif yaitu:

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.

6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
7. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat system baru bila terjadi perubahan kondisi.

Menurut Arif et.al (2016:548) pengawasan yang baik memiliki beberapa aspek antara lain:

- a. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar).
- b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/seyatnya dikerjakan.
- c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.1.3 Kepemimpinan Kepala Desa

2.1.3.1. Pengertian Pimpinan

Dalam bahasa Indonesia "pemimpin" sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara (Pasolong, 2019:3). Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan "pemimpin".

Menurut Fahmi (2015:58) menjelaskan kepemimpinan merupakan sebagai berikut: 'suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan,

mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia”.

Lebih jelas pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli yang dikutip dalam Fahmi (2015:58) adalah sebagai berikut:

1. Stephen P Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan.
2. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan.
3. Ricky W Griffin mengatakan, kepemimpinan adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan; pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.

Turney (1971) dalam Sule dan Donni (2018:3) menjelaskan pengertian kepemimpinan adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasi sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengarahan dan aplikasi teknik manajemen. Berdasarkan uraian tersebut, maka Sule dan Donni (2018:3) menjelaskan terdapat tiga implikasi penting dari kepemimpinan adalah:

1. Kepemimpinan meliputi penggunaan pengaruh bahwa semua hubungan dapat melibatkan pimpinan
2. Kepemimpinan mencakup pentingnya proses komunikasi, kejelasan dan keakuratan dari komunikasi untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja para pengikutnya
3. Kepemimpinan menfokuskan pada pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang efektif berhubungan dengan berbagai tujuan baik tujuan perusahaan, tujuan kelompok/tim serta tujuan individu.

Menurut Djamaludin (2015:3) proses kepemimpinan adalah sebagai berikut:

“Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap para anggota kelompok. Pengertian ini mengandung tiga implikasi penting yaitu:

- a) Kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan atau pengikut
- b) Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan antara pimpinan dan kelompok secara seimbang karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya

- c) Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara”.

Dengan demikian kepemimpinan adalah suatu proses untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain melalui suatu perilaku yang khas sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Pemimpinan harus membujuk orang-orang lain atau pengikutnya melalui berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.

2.1.3.2 Perilaku Pimpinan

Perilaku pimpinan berhubungan dengan perilaku khusus dan pribadi para pemimpin yang berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai pimpinan (Sule dan Donni 2018:20). Pimpinan merupakan suri keteladanan sehingga harus memiliki perilaku yang baik. Robbins dan Coulter (2016:180) menjelaskan ada berbagai bentuk perilaku pimpinan yang telah diteliti oleh sejumlah ilmuwan adalah:

1. Perilaku kepemimpinan demokratis
2. Perilaku kepemimpinan otokrasi
3. Perilaku kepemimpinan
4. Perilaku pertimbangan ide dan perasaan
5. Perilaku membentuk struktur kerja dan hubungan kerja
6. Perilaku orientasi pada bawahan
7. Perilaku orientasi pada pekerjaan

Kemudian Rivai (2018:143) menjelaskan perilaku kepemimpinan:

Seorang pimpinan dalam kepemimpinan harus disertai tanggung jawab dan mampu membangun atau memotivasi bawahan untuk bekerja dengan baik. Ada beberapa perilaku yang diperlukan pimpinan adalah:

1. Partisipasi
Pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam memberi ide dan pendapat.
2. Komunikasi

- Pimpinan mencari dan memberi informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas.
3. Mengakui andil baik
Motivasi bawahan dapat ditingkatkan apabila pimpinan selalu bersedia untuk mengakui bahwa bawahan memiliki andil dalam pencapaian tugas.
 4. Delegasi wewenang
Pimpinan dapat memberi otoritas kepada bawahan untuk memutuskan sesuatu yang mempengaruhi hasil kerja
 5. Memberikan perhatian timbal balik
Pimpinan menginginkan perhatian dari bawahan dan menaruh perhatian terhadap apa yang diinginkan bawahan.

Kemudian menurut Griffin (2017:81) menguraikan beberapa bentuk perilaku yang diperankan oleh pimpinan antara lain:

1. Perilaku direktif yaitu membiarkan bawahan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, menyediakan pedoman dan arah serta membuat jadwal kerja.
2. Perilaku suportif yaitu bersikap bersahabat dan mudah mendekati, memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan memperlakukan bawahan sederajat.
3. Perilaku partisipasi yaitu berkomunikasi, meminta saran dari bawahan dan mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan.
4. Perilaku orientasi pencapaiannya itu menetapkan tujuan yang menentang, mengharapakan bawahan menampakkan kenerja tinggi, mendorong bawahan dan menampakan keyakinan pada kemampuan bawahan.

Dengan demikian banyak perilaku yang muncul dalam proses kepemimpinan dan dampaknya sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa perilaku mungkin sesuai diterapkan pada industri/lapangan kerja tertentu sementara yang lainnya tidak. Semuanya sangat ditentukan oleh kondisi tenaga dan lingkungan kerja.

2.1.3.3 Peran Kepemimpinan

Dengan demikian pimpinan harus memiliki berbagai aspek untuk berperan dalam perusahaan, karena pimpinan akan berhadapan dengan sebahagian besar karyawan yang memiliki sifat dan perilaku yang berbeda. Menurut Purwanto (2019:35) pimpinan disemua level dalam perusaahaan memiliki peran strategis bagi pengembangan organisasi kedepan.

Lebih lanjut Mintzberg dalam Purwanto (2019:35) terdapat tiga peran pimpinan dalam perusahaan adalah:

1. Peran Antarpribadi
 - a. Tokoh figur
 - b. Manajer
 - c. Penghubung
2. Peran Informasional
 - a. Monitoring
 - b. Penyebar informasi
 - c. Juru bicara
3. Peran Keputusan
 - a. Wirausaha
 - b. Pemecah masalah
 - c. Pengalokasi sumber daya
 - d. Negosiator

Menurut Stones dalam Sule dan Donni (2018:12) menjelaskan ada 2 fungsi utama dari pimpinan adalah:

1. Fungsi berorientasi pada tugas atau penyelesaian masalah
 - a. Menciptakan kegiatan
 - b. Mencari informasi
 - c. Memberi informasi
 - d. Memberi pendapat
 - e. Menjelaskan
 - f. Mengkoordinir
 - g. Meringkaskan
 - h. Menguji kelayakan
 - i. Mengevaluasi
 - j. Mendiagnosa
2. Fungsi pemeliharaan group atau fungsi sosial
 - a. Mendorong semangat
 - b. Menetapkan standar
 - c. Mengikuti
 - d. Mengekspresikan perasaan
 - e. Mengambil consensus
 - f. Menciptakan keharmonisan
 - g. Mengatasi ketegangan

Dengan demikian peranan pimpinan terdiri dari berbagai bentuk dan bukan sekedar mengajak para bawahannya untuk bekerja semata. Pimpinan harus dapat berperan sebagai figur, perantara, monitoring, juru bicara dan pengendalian gangguan dalam perusahaan.

Pimpinan juga harus dapat merumuskan misi dan visi dan memaksimalkan sumber daya perusahaan khususnya bawahan sebagai modal untuk bertanggung jawab dan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa keberadaannya dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi.

2.1.3.4 Indikator Kepemimpinan

Tread (1985) dalam Sule dan Donni (2018:18) ada 7 ukuran dari kepemimpinan yang berorientasi kinerja adalah:

1. Memberikan perintah
2. Memberikan hukuman dan pujian
3. Memupuk tingkah laku pribadian yang benar
4. Peka terhadap berbagai saran
5. Memperkuat rasa kesatuan kelompok
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab
7. Keputusan yang bernilai dan tepat waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Sriani, Ni Made (2021) Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 3. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata UHI. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki berbagai pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Bustanil et al., (2020) dengan judul Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kepemimpinan kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan terhadap pengolahan keuangan dengan nilai t hitung 2.545 > t tabel 2.017 berarti ada pengaruh (x_1) pengawasan terhadap y pengelolaan keuangan, pengaruh kepemimpinan terhadap pengolahan keuangan dengan nilai t hitung 2.545 > t tabel 2.017 berarti ada pengaruh (x_2) kepemimpinan terhadap (y) pengelolaan keuangan. pengaruh pengawasan dan kepemimpinan terhadap pengolahan keuangan dengan nilai f hitung 8.325 > f tabel 3.21 berarti ada pengaruh (x) pengawasan dan kepemimpinan terhadap (y) pengelolaan keuangan.

Anggraeni, Prita Dilla dan Nur Laila Yuliani(2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Inspektorat dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *Jurnal Prosiding and Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Werdhani (2018) dengan judul Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto). Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa sudah efektif. Keefektifan tersebut bisa terlihat dari terealisasinya pembuatan gorong-gorong dan irigasi Desa. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dapat dilihat pada

Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

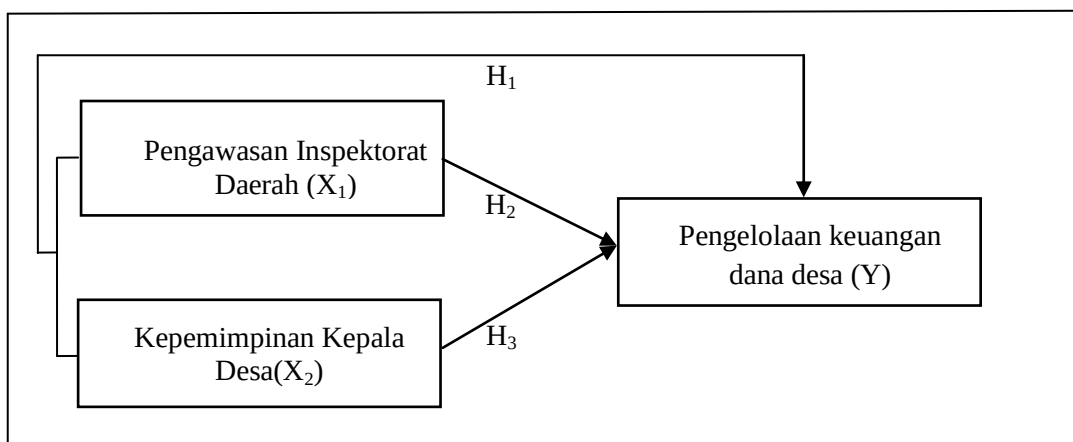
No	Judul dan Nama peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). (Sriani, 2021)	Menggunakan analisis regresi linier berganda	Akuntabilitas, kepemimpinan Kepala Desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.	Satu variable bebas yang sama yaitu kepemimpinan kepala desa Variable terikat yang sama yaitu pengelolaan dana desa	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian Model analisis regresi linier Variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat
2	Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kepemimpinan kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. (Bustanil et al., 2020)	Analisis regresi linier berganda	Pengaruh pengawasan dan kepemimpinan terhadap pengolahan keuangan di peroleh nilai t dan F hitung > t dan F tabel berarti ada pengaruh pengawasan dan kepemimpinan terhadap pengelolaan keuangan baik secara parsial maupun simultan.	Dua variable bebas yang sama yaitu pengawasan inspektorat daerah dan kepemimpinan kepala desa Variable terikat yang sama yaitu pengelolaan dana desa Model analisis regresi linier	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian
3	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). (Anggraeni, dan Nur2019)	Menggunakan analisis regresi linier berganda	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana	Satu variable bebas yang sama yaitu kepemimpinan kepala desa Variable terikat yang sama yaitu pengelolaan dana desa	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian Model analisis regresi linier Variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat

			desa.		
4	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto). (Werdhani, 2018)	Menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa sudah efektif, artinya kepemimpinan kepala desa telah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.	Satu variable bebas yang sama yaitu kepemimpinan kepala desa Variable terikat yang sama yaitu pengelolaan dana desa	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian Model analisis regresi linier

Sumber: Data Diolah (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan konsep hubungan antara variabel sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran, maka pengujian hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut:

- H₁: Pengawasan Inspektorat Daerah dan kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.
- H₂: Pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.
- H₃: Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan variabel bebas yaitu pengawasan Inspektorat Daerah dan kepemimpinan Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Menurut Arikunto (2013:247-248) penelitian korelasional (*correlational research*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Adapun variabel penelitian ini adalah:

- a. Variabel bebas berupa pengawasan Inspektorat Daerah, dan kualitas sumber daya manusia aparatur Desa
- b. Sementara variabel terikat berupa Pengelolaan Keuangan dana Desa.

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Satu Tahap (*One Shoot Study*). Studi ini merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau beberapa subyek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (hari, minggu, bulan atau tahun). Tipe ini lebih menekankan pada frekuensi tahap pengumpulan data, yaitu satu tahap dan sekaligus (Indriantoro dan Supomo, 2018:94).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran dan Roger, 2017:173). Pernyataan masalah dilakukan dapat berfokus pada masyarakat dan kelompok aparatur pemerintah desa di Kabupaten Pidie yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa terdiri dari atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) dan pelaksana teknis (Kepala Urusan).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh individu yang dimaksudkan untuk diteliti dan yang nantinya akan digeneralisasi (Winarsunu, 2015:11). Sementara sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Winarsunu, 2015:11). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Pidie. Dengan demikian jumlah populasi dalam penelitian adalah sebanyak 1.460 perangkat desa dari 730 Desa di Kabupaten Pidie atau masing-masing Desa mewakili 2 perangkat Desa yaitu sekretariat Desa dan pelaksana teknis (Kepala Urusan Keuangan). Sampel penelitian memasukkan sebagian elemen populasi sehingga penelitian ini dikatakan seleksi. Sementara teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Menurut (Sugiono 2001:57), teknik random sampling adalah salah satu langkah atau cara mengambil sampel dari seluruh populasi yang dilakukan secara acak.

Tabel 3.1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kecamatan	Desa	Perangkat Desa		Jumlah Sampel
			Sekretaris Gampong	Kepala Urusan Keuangan	
1	Sakti	Gampong Jeumpa Pulo Jeumpa	1	1	2
			1	1	2
2	Titeu	Lingkok Paloh Naleung	1	1	2
			1	1	2
3	Keumala	Dayah Keumala Jijiem	1	1	2
			1	1	2
4	Mila	Mesjid Ilot Lagang	1	1	2
			1	1	2
5	Mutiarra Timur	Tiba Raya Mesjid Tiba	1	1	2
			1	1	2
6	IndraJaya	Dayah Caleu Mesjid Suwiek	1	1	2
			1	1	2
7	Glumpang Tiga	Cot Tunong Cot Baroh	1	1	2
			1	1	2
8	Kota Sigli	Blang Paseh Blok Sawah	1	1	2
			1	1	2
9	Pekan Baro	Rambayan Kupula Rambayan Lueng	1	1	2
			1	1	2
10	Pidie	Tijue Lampeudeu Tunong	1	1	2
			1	1	2
11	Tiro	Rabo Lhok Igeuh	1	1	2
			1	1	2
	Jumlah		22	22	44

Sumber: PERBUB Kabupaten Pidie Nomor 3, 2021

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran dan Roger, 2017: 60). Dengan demikian data penelitian adalah data primer yang langsung dikumpulkan dari aparaturnya desa. Pengumpulan data primer dilakukan pembagian kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2013:127). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan.

Konversi data dalam kuesioner menggunakan skala likert. Skala likert dapat digunakan untuk mengukur item-item pernyataan yang bersifat positif maupun negatif terhadap masalah yang diteliti (Sekaran dan Roger, 2017:) Alternatif penilaian dalam pengukuran untuk item-item yang bersifat positif adalah dari jawaban responden mulai dari jawaban, setuju, sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan nilai kategori 1-5. Nilai kategori dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Setuju	1
2	Sangat Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	4
5	Sangat Tidak Setuju	5

Sumber: (Sekaran, 2011)

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu masing-masing dua variabel bebas yang terdiri dari Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kepemimpinan Kepala Desa serta melibatkan satu variabel terikat yaitu Pengelolaan Dana Desa.

Seluruh variabel tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
Independen						
1	Pengawasan Inspektorat Daerah (X ₁)	“pengawasan sebagai tindakan untuk menilai apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan (Henry Fayol dalam Arif <i>et al</i> , 2016:549)”.	Ada unsur keakuratan atau pedoman dan valid.	Likert	1-5	A1
			Tepat waktu dan dievaluasi secara tepat			A2
			Objektif dan menyeluruh			A3
			Terpusat, dengan memutuskan pada bidang penyimpangan yang sering terjadi			A4
			Realistis secara ekonomis			A5
			Realistis secara organisasional			A6
			Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi			A7
2	Kepemimpinan kepala Desa (X ₂)	Kepemimpinan adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasi sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengarahan dan aplikasi teknik manajemen (Turney (1971) dalam Sule dan Donni (2018:3)	Memberikan perintah	Likert	1-5	B1
			Memberikan hukuman dan pujian			B2
			Memupuk tingkah laku pribadian yang benar			B3
			Peka terhadap berbagai saran			B4
			Memperkuat rasa kesatuan kelompok			B5
			Mengembangkan rasa tanggung jawab			B6
			Keputusan yang bernilai dan tepat waktu			B7

Lanjutan Tabel 3.3

Dependen						
3	Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)	Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa (Pasal 2, Permendagri No 20 Tahun 2018)	Perencanaan	Likert	1-5	C1
			Pelaksanaan			C2
			Penatausahaan			C3
			Pelaporan			C4
			Pertanggung jawaban keuangan desa			C5

Sumber: Data Diolah (2021)

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel serta pengaruh secara parsial dan simultan. Persamaan model empiris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan keuangan dana desa

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien regresi X_1 dan X_2

X_1 = Pengawasan Inspektorat Daerah

X_2 = Kepemimpinan Kepala Desa

e = Error

Untuk menguji peranan variabel independen (X_1, X_2) secara simultan terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis koefisien determinasi (r^2). Dalam regresi, r^2 ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika r^2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi

cocok dengan data secara sempurna. Interpretasi lain ialah bahwa r^2 diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh regresor (variabel bebas / X) dalam model. Dengan demikian, jika $r^2 = 1$ akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. jika $r^2 = 0$ akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor (X) dengan variabel Y.

Secara sederhana r^2 merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Oleh karena itu, penggunaan koefisien determinasi dalam korelasi tidak harus diinterpretasikan sebagai besarnya pengaruh variabel X terhadap Y mengingat bahwa korelasi tidak sama dengan kausalitas. Secara bebas dikatakan dua variabel mempunyai hubungan belum tentu variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. Dalam hubungannya dengan korelasi, maka r^2 merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang berkaitan dengan variabel bebas (X) dan variabel Y (tergantung). Secara umum dikatakan bahwa r^2 merupakan kuadrat korelasi antara variabel yang digunakan sebagai prediktor (X) dan variabel yang memberikan response (Y).

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur secara nyata. Validitas instrument tersebut akan menggambarkan tingkat kemampuan kuesioner untuk mengukur objek-objek yang diteliti (Sudarmanto, 2010:78).

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS), dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi

yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau dalam bahasa statistik terdapat konsisten internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan tersebut dapat mengukur aspek yang sama. Dengan kata lain, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas instrument menggambarkan kepercayaan kepada kemantapan alat ukur yang digunakan yaitu angket. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang baik atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut stabil dan konsisten sehingga alat ukur tersebut akan dapat memberikan hasil pengukuran yang serupa dan tidak berubah-ubah (Sudarmanto, 2010:89). Nilai reliabilitas yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS. Uji coba yang dilakukan untuk menghitung koefisien alpha tersebut hanya dilakukan satu kali saja. Menurut Maholtra (2005) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai di atas 0,6.

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan sebuah kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Terdapat kemungkinan data aktual tidak memenuhi semua asumsi klasik ini. Beberapa perbaikan, baik pengecekan kembali data outlier maupun recollecterror data dapat dilakukan. Pengujian asumsi klasik yang dipaparkan dalam penelitian ini antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Hubungan linier antara variabel independen didalam regresi berganda dalam persamaan disebut multikolinearitas. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang kurang sempurna. Ketika kolinieritas antar variabel independen naik maka varian estimator juga akan naik dan menjadi nilai yang tidak terbatas, karena varian terus naik jika ada multikolinearits maka standard error β_1 dan β_2 juga naik.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji bahwa varian (error term) dari data observasi dalam penelitian ini sama untuk semua variabel terikat dengan variabel bebas sehingga hasil estimasi tidak bisa, maka perlu diidentifikasi melalui uji heteroskedastisitas. Untuk membuktikan apakah data observasi dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas ditempuh dengan uji white.

3.7 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono, bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori. Sementara itu, Dantes menjelaskan hipotesis merupakan praduga yang harus diuji kebenarannya lewat data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara uji asumsi klasik dengan menggunakan parameter regresi linier berganda.

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t_{hitung} bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Model hipotesis yang digunakan dalam uji t_{hitung} ini adalah:

$H_1 : b_1 = 0$ artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.

$H_2 : b_2 \neq 0$ artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.

Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

H_1 diterima/ditolak

H_2 berpengaruh/tidak berpengaruh

1.7.2 Uji F

Uji F_{hitung} dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Model hipotesis yang digunakan dalam uji F_{hitung} .

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} kriteria pengambilan keputusan yaitu:

H_1 diterima/ditolak

H_1 berpengaruh/tidak berpengaruh

1.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel *independent*. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependent* (tidak bebas). Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) berarti kemampuan variabel-variabel *independent* (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel *dependent* sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependent*.

Dalam kenyataan nilai *Adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai *Adjusted* R^2 negatif, maka nilai *Adjusted* di anggap bernilai 0. Secara matematis jika $R^2 = 1$ maka *Adjusted* $R^2 = R^2 = 1$. Sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *Adjusted* $R^2 = (1-k) / (n-k)$. jika $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai negatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kota Sigli, Kabupaten Pidie merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2021 sebanyak 435.492 jiwa, dengan kepadatan 141 jiwa. Kabupaten Pidie memiliki beragam Potensi Wisata, Perkebunan, Kelautan dan Sumber Daya Alam yang tersebar di 23 Kecamatan.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Mereka terpilih secara acak di sejumlah Desa di Kabupaten Pidie dan masing-masing Desa mewakili 2 sampel. Aparatur desa memiliki tingkat umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang berbeda. Karakteristik aparatur desa di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Umur	36-40 Tahun	13	29.5
		41-45 Tahun	15	34.1
		46-50 Tahun	10	22.7
		>50 tahun	6	13.6
		Total	44	100,0

2	Kelamin	Laki-laki	39	88.6
		Perempuan	5	11.4
		Total	44	100,0
3	Pendidikan	SLTA	13	29.5
		DIII	17	38.6
		S1	14	31.8
		Total	44	100,0

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 menjelaskan sebahagian besar atau 34,1% dari jumlah Aparatur Desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie berumur antara 41-45 tahun. Ada 13,6% dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie dengan umur lebih dari 50 tahun dan 29,5% dari jumlah aparatur desa berusia lebih muda yaitu antara 36–40 tahun. Selebihnya 22,7% dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie berumur antara 46-50 tahun.

Aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie sebahagian besar atau 88,6% berjenis kelamin laki-laki, hanya ada 11,4% berjenis kelamin perempuan. Mereka sebahagian besar atau 38,6% dengan latar belakang pendidikan DIII. Ada 31,8% dari jumlah aparatur desa dengan latar belakang pendidikan S1. Selebihnya 29,5% dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie dengan latar belakang pendidikan SLTA.

4.3 Deskriptif Variabel Penelitian

4.3.1 Variabel Pengawasan Inspektorat

Variabel penelitian pengawasan inspektorat dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Gambaran Peran Inspektorat Dalam Pengawasan
Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pidie

No	Pengawasan inspektorat	Sgt Tdl Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan dana desa di dukung oleh ukuran dan standar kerja yang telah di rencanakan secara berkualitas.	0	0,0	0	0,0	10	22.2	33	73.3		0,0	3.705
2.	Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dana desa tepat waktu.	0	0,0	0	0,0	13	28.9	31	68.9	1	2.2	3.750
3.	Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dana desa selalu mendapat penilaian dan pemantauan setiap saat.	0	0,0	0	0,0	20	44.4	13	28.9	12	26.7	3.841
4.	Pengawasan telah membuat perbaikan dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi.	0	0,0	1	2.2	5	11.1	25	55.6	14	31.1	4.182
5.	Pengawasan telah membuat adanya evaluasi perbandingan keuangan dana desa berdasarkan rencana yang diharapkan.	0	0,0	0	0,0	6	13.3	32	71.1	7	15.6	4.046
6.	Pengawasan telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pengeloaan keuangan dana desa	0	0,0	0	0,0	10	22.2	35	77.8	0	0,0	3.796
7.	Pengawasan telah membuat pengelolaan keuangan desa terarah sesuai dengan apa yang dibutuhkan didalam desa.	0	0,0	2	4.4	12	26.7	16	35.6	15	33.3	4.000
	Rerata	3,903										

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4.2 menjelaskan peran pengawasan inspektorat aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,903 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah

aparatur desa yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang pengawasan inspektorat tersebut. Kalaupun ada dari responden yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Dari 7 (tujuh) indikator yang digunakan dalam pengukuran pengawasan inspektorat, terpusat dengan memutuskan pada bidang penyimpangan yang sering terjadi menjadi indikator terbaik dari kegiatan pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Pidie dengan nilai jawaban tertinggi yaitu dengan nilai 4,182 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menjawab setuju jika pengawasan telah membuat perbaikan dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi.

Sementara ada unsur keakuratan atau pedoman dan valid menjadi indikator pengawasan inspektorat yang masih rendah dalam pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie dengan nilai jawaban 3.705 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menjelaskan bahwa sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menjawab setuju jika Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan dana desa di dukung oleh ukuran dan standar kerja yang telah di rencanakan secara berkualitas.

4.3.2 Variabel Kepemimpinan kepala Desa

Variabel penelitian kepemimpinan kepala Desa dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Gambaran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan
Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pidie

No	Kepemimpinan kepala Desa	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Kepala Desa telah memberikan perintah sesuai peraturan dalam melakukan semua kegiatan anggaran dana desa.	0	0.0	0	0.0	22	48.9	13	28.9	10	22.2	3.750
2.	Ketika ada pengelolaan keuangan desa tidak sesuai peraturan kepala desa memberikan teguran.	0	0.0	9	20.0	25	55.6	11	24.4	0	0.0	3.046
3.	Kepala desa selalu bersikap jujur dan berterus terang jika adanya kejanggalan yang menyimpang dari peraturan.	0	0.0	0	0.0	12	26.7	27	60.0		0.0	3.477
4.	Kepala desa selalu menerima saran dalam pengelolaan keuangan dana desa.	0	0.0	4	8.9	21	46.7	20	44.4	0	0.0	3.364
5.	Selalu mengutamakan kepentingan umum dalam membuat suatu keputusan sebagai amanat undang-undang.	0	0,0	0	0.0	13	28.9	21	46.7	7	15.6	3.705
6.	Kepala desa selalu mengutamakan sikap tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa.	0	0,0	0	0.0	17	37.8	18	40.0	10	22.2	3.864
7.	Kepala desa memberikan keputusan yang baik sesuai dengan hasil dari diskusi.	0	0,0	6	13.3	11	24.4	24	53.3	4	8.9	3.591
	Rerata	3,542										

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4.3 menjelaskan peran kepemimpinan kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,542 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju).

Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang kepemimpinan kepala Desa tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Dari 7 (tujuh) indikator yang digunakan dalam pengukuran peran kepemimpinan kepala desa, mengembangkan rasa tanggung jawab menjadi indikator peran kepemimpinan kepala desa yang terbaik di Kabupaten Pidie dengan nilai jawaban 3,864 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menjawab setuju jika Kepala Desa selalu mengutamakan sikap tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa,

Sementara memberikan teguran menjadi indikator kepemimpinan kepala desa yang masih rendah di Kabupaten Pidie dengan nilai jawaban 3,046 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan bahwa sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menjawab kurang setuju jika ketika ada pengelolaan keuangan desa tidak sesuai peraturan kepala desa memberikan teguran.

4.3.3 Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Variabel penelitian pengelolaan keuangan dana desa dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Gambaran Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pidie

No	Pengelolaan keuangan dana desa	Sgt Tdl Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Pengelolaan dana desa telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.	0	0.0	1	2.2	11	24.4	29	64.4	4	8.9	3.818
2.	Pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku tanpa adanya kepentingan sekelompok pihak untuk mendapatkan keuntungan.	0	0.0	0	0.0	14	31.1	24	53.3	7	15.6	3.864
3.	Penatausahaan yang telah direncanakan dapat memberi mamfaat dan dampak yang lebih besar dari jumlah anggaran yang dikeluarkan.	0	0.0	0	0.0	18	40.0	16	35.6	8	17.8	3.659
4.	Semua anggaran yang digunakan untuk operasional desa telah dipublikasi dan dilaporkan secara jelas.	0	0.0	3	6.7	20	44.4	22	48.9	0	0.0	3.432
5.	Laporan pertanggung jawaban dana desa selalu tepat waktu.	0	0.0	0	0.0	18	40.0	22	48.9	4	8.9	3.659
	Rerata	3,686										

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4.4 menjelaskan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,686 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pidie menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Dari 7 (tujuh) indikator yang digunakan dalam pengukuran pengelolaan dana desa, pelaksanaan keuangan dana desa menjadi indikator pengelolaan keuangan dana desa aparatur desa yang terbaik dengan nilai jawaban 3,864 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menjawab setuju jika pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku tanpa adanya kepentingan sekelompok pihak untuk mendapatkan keuntungan..

Sementara pelaporan menjadi indikator pengelolaan keuangan dana desa aparatur desa yang terendah dengan nilai jawaban yaitu 3,432 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menjelaskan bahwa sebahagian besar dari jumlah aparatur desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menjawab kurang setuju jika semua anggaran yang digunakan untuk operasional desa telah dipublikasi dan dilaporkan secara jelas.

4.4 Hasil Pengujian Data

4.4.1 Pengujian Instrumen

1) Hasil Uji Validitas

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil dari seperangkat set indikator dari hasil pembagian kuesioner sehingga data yang dihasilkan tersebut perlu dilakukan uji kebenaran atau validitas. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor item tiap pertanyaan dan skor rata-rata untuk seluruh pertanyaan yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coeffisient of Corelation*. Pengukuran nilai tersebut

dihitung dengan bantuan perangkat program SPSS. Nilai korelasi hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5%. Nilai *product moment* pada df 44 dan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 0,294. Lebih jelas hasil uji validitas dapat dilihat Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 44	Keterangan
A1	Pengawasan inspektorat daerah (X ₁)	0.762	0,294	Valid
A2		0.651	0,294	Valid
A3		0.890	0,294	Valid
A4		0.698	0,294	Valid
A5		0.921	0,294	Valid
A6		0.870	0,294	Valid
A7		0.687	0,294	Valid
B1	Kepemimpinan kepala Desa (X ₂)	0.644	0,294	Valid
B2		0.806	0,294	Valid
B3		0.790	0,294	Valid
B4		0.831	0,294	Valid
B5		0.715	0,294	Valid
B6		0.756	0,294	Valid
B7		0.765	0,294	Valid
C1	Pengelolaan keuangan dana desa (Y)	0.724	0,294	Valid
C2		0.753	0,294	Valid
C3		0.841	0,294	Valid
C4		0.794	0,294	Valid
C5		0.843	0,294	Valid

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 menjelaskan bahwa data primer yang digunakan dalam variabel pengawasan inspektorat (X₁) yang terbentuk dari nilai pertanyaan item A1 sampai dengan A7, data variabel kepemimpinan kepala Desa (X₂) yang terbentuk dari nilai pertanyaan item B1 sampai dengan B7 dan pengelolaan keuangan dana desa (Y) yang terbentuk dari nilai pertanyaan item C1 sampai dengan C5 seluruhnya memiliki koefisien korelasi r hitung > nilai r tabel *product-moment* pada *level of significant* 5% (0,294) sebagaimana terlihat pada Lampiran 7. Dengan demikian

seluruh butir indikator ukur yang digunakan dalam pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid dan signifikan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

2) Hasil Uji Reliabilitas

Penggunaan item-item pertanyaan untuk data penelitian yang akan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini mensyaratkan adanya suatu pengujian konsistensi melalui uji reliabilitas (kehandalan), sehingga data yang digunakan untuk analisis benar-benar dapat dipercaya. Uji kehandalan item pertanyaan pada kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas internal dari nilai Alpha. Uji ini hanya dilakukan satu kali pada sekelompok responden pada masing-masing variabel. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60. Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.6.

Tabel. 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Alpha	Keterangan
1	Pengawasan inspektorat (X_1)	A1 s/d A7	0.844	Handal
2	Kepemimpinan kepala Desa (X_2)	B1 s/d B7	0.895	Handal
3	Pengelolaan keuangan dana Desa (Y)	C1 s/d C5	0.851	Handal

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 menjelaskan hasil uji reliabilitas terhadap 7 (tujuh) atribut pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data variabel Pengawasan Inspektorat (X_1), 7 (tujuh) atribut pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X_2) dan 5 (lima) atribut pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa (X_2) diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0,844, 0,895 dan 0,851. Dengan

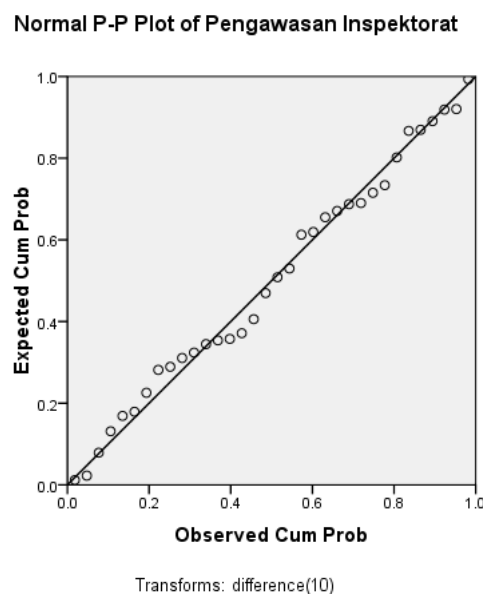
demikian alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini telah dapat terpercaya atau memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* dengan nilai alpha lebih dari 0,60.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Pengujian Normalitas.

Baik data skala pengawasan inspektorat (X_1), kepemimpinan kepala Desa (X_2) dan pengelolaan keuangan dana desa (Y) harus mencerminkan data skala yang bebas dari pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi nilai-nilai sampel pada variabel penelitian sesuai dengan distribusi teoritis maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan gambar normal P-P Plot. Gambar ini menunjukkan sebaran *standarrized residual* berada dalam kisaran garis diagonal seperti terlihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Uji Normalitas Pengawasan Inspektorat



Berdasarkan gambar normal P-P Plot di atas menunjukkan bahwa data observasi pengelolaan keuangan dana desa dengan data distribusi sudah mendekati distribusi normal. Begitu juga dengan variabel lainnya sebagaimana terlampir.

2) Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Cara untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada Variance Inflation Factor (VIF). Batas VIF yang ditetapkan adalah 10. Jika nilai VIF di atas 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji dapat dijelaskan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1	Pengawasan inspektorat (X_1)	0.895	1.117	Non Multikolinieritas
2	Kepemimpinan kepala Desa (X_2)	0.895	1.117	Non Multikolinieritas

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Hasil pengujian multikolinieritas di atas menunjukkan nilai VIF dari dua variabel bebas yang terlibat dalam model analisis yaitu pengawasan inspektorat (X_1) dan kepemimpinan kepala Desa (X_2) adalah masing-masing 1,117 atau $< 10,00$ sehingga dapat diartikan tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel bebas tersebut. Dengan demikian model regresi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini masing-masing diprediksi secara terpisah oleh kekuatan masing-masing variabel sehingga sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

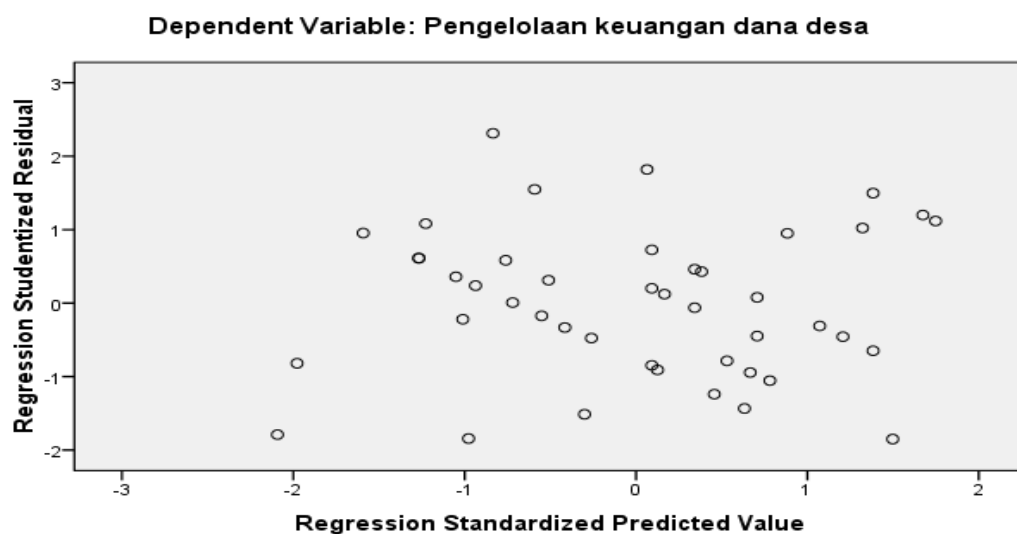
3) Heteroskedastisitas

Asumsi dari penggunaan data skala dalam model regresi linier berpotensi terjadinya gangguan (*disturbance*) U_1 yang di kenal dengan gangguan Homoscedastic. Homoscedastic terjadi jika data dari variabel pengawasan inspektorat (X_1), kepemimpinan kepala Desa (X_2) dan pengelolaan keuangan dana desa (Y) mempunyai varian yang sama, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesalahan. Alat untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan metode chart (diagram scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

1. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik (point-point), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Output SPSS hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot



Berdasarkan chart diatas terlihat bahwa pengaruh data pengawasan inspektorat dan data kepemimpinan kepala Desa memperlihatkan pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar keatas dan dibawah 0, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.

Pengaruh pengawasan inspektorat daerah dan kepemimpinan kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa dalam model analisis ini dapat dibuktikan melalui formula regresi berganda (multiple regression). Formulasi ini bertujuan untuk memprediksi sejauh mana tingkat kenaikan skala likert dari 2 (dua) variabel bebas terhadap kenaikan skala variabel terikat pada tingkat kesalahan tertentu (signifikan) atau dimana pengaruh antar variabel tersebut benar-benar nyata (signifikan). Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	0,160	0,495	
	Pengawasan inspektorat	0,476	0,099	.509
	Kepemimpinan kepala Desa	0,494	0,123	.425

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

4.5.1 Koefisien Regresi.

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dibuat persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,160 + 0,476X_1 + 0,494X_2 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 0,160 dapat diartikan bahwa jika Pengawasan Inspektorat (X_1) dan Kepemimpinan Kepala Desa (X_2) dianggap konstan, maka Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) di Kabupaten Pidie secara konstan berada pada posisi 0,160 unit skala likert.
2. Pengaruh variabel pengawasan inspektorat di peroleh nilai regresi sebesar 0,476 unit skala likert, menjelaskan setiap meningkatnya Pengawasan Inspektorat 1 (satu) satuan maka akan dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pidie sebesar 0,476 satuan. Dengan demikian jika Pengawasan Inspektorat Aparatur Desa dapat ditingkatkan maka Pengelolaan Keuangan Dana Desa Aparatur Desa di Kabupaten Pidie akan semakin baik.
3. Pengaruh variabel Kepemimpinan kepala Desa diperoleh nilai regresi sebesar 0,494 unit skala likert, menjelaskan setiap meningkatnya Kepemimpinan Kepala Desa 1 (satu) satuan maka akan dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Aparatur Desa di Kabupaten Pidie sebesar 0,494 satuan. Dengan demikian jika Kepemimpinan Kepala Desa dapat ditingkatkan maka Pengelolaan Keuangan Dana Desa Aparatur Desa di Kabupaten Pidie akan semakin baik.

4.5.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Pengaruh linier antara pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan dana desa selalu memiliki hubungan yang dapat di buktikan dengan koefisien korelasi berganda dan koefisien diterminansi. Koefisien ini menjelaskan keeratan hubungan

keseluruhan variabel bebas secara serentak dengan variabel tak bebas. Nilai korelasi bergerak antara -1 sampai dengan +1 dan semakin masuk dalam kategori nilai 1 atau sama dengan 1 maka korelasi antara variabel akan semakin kuat atau sebaliknya. Sedangkan koefisien dterminasi berganda adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh secara serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate
1	.761	.579	.559	.37106

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Nilai (R) sebesar 0,761 atau 76,1% menjelaskan secara positif terdapat hubungan antara variabel pengawasan inspektorat dan kepemimpinan kepala Desa dengan pengelolaan keuangan dana desa aparatur desa di Kabupaten Pidie dengan keeratan hubungan 76,1%. Hubungan tersebut tergolong kuat karena nilai koefisien berada antara 0,50-0,70.

Nilai (R^2) sebesar sebesar 0,579 atau 57,90% menjelaskan, pengaruh variabel pengawasan inspektorat dan kepemimpinan kepala Desa dalam mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie adalah sebesar 0,579 atau 57,90%. Sementara nilai sisa sebesar 0,421 atau 42,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini seperti pengawasan dan pemeriksaan, sistem informasi serta faktor lainnya.

4.5.3 Pengujian Hipotesis

4.5.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (secara parsial). Dengan menganggap variabel lainnya konstan. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pembuktian hipotesis secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		t	t tabel	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	0.160	0.495	0.323	2.014	0.748
	Pengawasan inspektorat	0.476	0.099	4.812		0.000
	Kepemimpinan kepala Desa	0.494	0.123	4.015		0.000

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

- Pengaruh pengawasan inspektorat (X_1) terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Y) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4.812 sementara nilai t_{tabel} pada tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 2.014. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (4.812) lebih besar dari t_{tabel} (2.014) pada batasan signifikan 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pengawasan inspektorat (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Y) di Kabupaten Pidie. Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis H_{a1} dan menolak hipotesis H_{o1} .
- Pengaruh kepemimpinan kepala Desa (X_2) terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Y) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4.015, sementara nilai t_{tabel} pada tingkat

kesalahan 5% adalah sebesar 2.014. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (4.015) lebih besar dari t_{tabel} (2.014) pada batasan signifikan 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara parsial kepemimpinan kepala Desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Y) di Kabupaten Pidie. Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis H_{a2} dan menolak hipotesis H_{o2} .

4.5.3.2 Pengujian Hipotesis Secara bersama-sama

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (secara simultan). Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ tingkat signifikan 5% maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pembuktian hipotesis secara simultan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Analisis Uji F

Mo del		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	F-tabel	Sig.
1	Regression	7.967	2	3.984	28.242	3,15	0,000 ^a
	Residual	5.783	42	.141			
	Total	13.750	44				

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Hasil perbandingan mean square regresi dan residual diperoleh nilai F hitung sebesar 28.242. Sedangkan nilai F tabel pada taraf signifikan 5% dan $n = 44$ adalah sebesar 3,15. Dengan demikian F hitung (28.242) diperoleh $> F$ tabel (3,15) pada batasan nilai probabilitas 0,000, sehingga hasil penelitian ini dapat diambil suatu keputusan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan menolak hipotesis nol (H_o),

artinya pengawasan inspektorat (X_1) dan kepemimpinan kepala Desa (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan inspektorat daerah dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.
2. Pengawasan inspektorat daerah berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.
3. Kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pidie.

5.2 Saran

Berdasarkan kelemahan di atas maka dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Kepala Desa perlu memberikan teguran terhadap aparatur desa yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana desa.
2. Semua anggaran yang digunakan untuk operasional desa harus dipublikasi dan dilaporkan secara jelas dalam Badan Musyawarah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agensyah, Amar., Darwanis, Mulia Syahputra (2016) Pengaruh Efektivitas Pengawasan, Frekuensi Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh Pada Provinsi Aceh *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 5, No. 4*, Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- Anggraeni, Prita Dilla dan Nur Laila Yuliani (2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Inspektorat dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *Jurnal Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian*. Reneka Cipta, Jakarta.
- Arif Soyan Mirrian *et al* (2016) *Manajemen Pemerintah*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Bustanil Anita Novianty², Lahibu Tuwu³, Muh. Rohady Ramadhan⁴ (2020) Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kepemimpinan kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Vol 2 No 3. Prosiding Konferensi Nasional ke-9 Asosiasi Program Pasccasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah Se-Indonesia*.
- Caro, Cornelius Complek.(2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, Governance, *eJurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 3*
- Djamaludin, Ancok. (2015). *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Yogyakarta: Erlangga
- Erni Trisnawati Sule dan Donni Juni Priansa. (2018). *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. (2014). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fahmi, Irham .(2015). *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta,
- Fahrojih dan Najih (2016) *Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara*, Jakarta: TRANS

- Griffin, Ricky w (2017) *Manajemen*. Jakarta: Erlangggga
- Hanif, Nurcholis.(2011) *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Indriantoro,Nur dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Untuk Akuntansi Dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE UGM
- Latif, Adam., ,Ahmad MustanirIrwana., (2020) *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat & Perencanaan Pembangunan*. Pasuruan: Qiara Media
- Mada, S. Lintje K. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Hal 106–115.
- Murhaini, Suriansyah (2014) *Manajemen Pengawasan Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardiasmo (2013) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nugroho Riant dan Firre An Suprpto (2021) *Manajemen Keuangan Desa: Bagian 2 Perencanaan Keuangan Desa*, Jakarta: Gramedia
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto Djoko. (2019). *Komunikasi Binis*, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Robbins, S dan Coulter Mary (2016) *Manajemen*, Jakarta: Indeks
- Rivai, Veithzal. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronny Setiawan, R, Andi Fahmi Miftahul Khair, A, Sapri, dan Irwan. (2020). Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, <http://www.researchgate.net>
- Republik, Indonesia *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik, Indonesia,*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota*

Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Salman. 2021. Pagu Indikatif Dana Desa kabupaten Pidie, <http://www.ajnn.net>

Sarwoto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru (2015) *Pengelolaan Keuangan dan Aktiva Daerah*. Bandung : Fokusmedi

Sholehah, Nur Lazimatul Hilma dan Parmin, Ishak (2021) *Gejala Patologi Birokrasi Pemerintahan Desa*, Gorontalo: Cahaya Ars Publisher.

Sriani, Ni Made (2021) Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 3*. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata UHI.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desanya dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Sumarsono, Sonny. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha. Ilm

Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Sekaran Uma dan Roger Bougie (2017) *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

- Sudarmanto,R. Gunawan. (2013).*Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19*.
- Sudana, I Made (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfa Beta
- Winarsunu,Tulus.(2015).*Statistik Dalam Penelitian Psikologi & Pendidikan*. Malang: UMM Press
- Werdhani, DhiniSetya (2018) Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto) *JurnalIlmiah Vol 2 No 2*. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- WartajakartaNews (2020) Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW, <https://wartajakartanews.wordpress.com/2020/05/14/ini-dia-12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/> di aksestanggal 18 oktober 2021.
- Wulandari. S. (2018). Pengaruh Sumber Daya Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Aksesibilitas, Penyajian Laporan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma. Klaten.
- Zakariya, Rizki (2020) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi, *INTEGRITAS: JurnalAntikorupsi*, Vol 6 No 2 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

KUESIONER**DETERMINAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DI KABUPATEN PIDIE****Demografi Responden**

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Umur : ☐ 25-30 Tahun
☐ 31-35 Tahun
☐ 36-40 Tahun
☐ 41-45 Tahun
☐ 46-50 Tahun
☐ >50 Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
2. Pendidikan : ☐ SLTA
☐ DIII
☐ S.1
☐ S.2

Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek (☒) pada angka pilihan:

NO	<u>JENIS PERTANYAAN</u> Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.					
		Setuju	Sangat Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat tidak Setuju
1.	Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan dana desa di dukung oleh ukuran dan standar kerja yang telah di rencanakan secara berkualitas.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
2.	Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dana desa tepat waktu.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
3.	Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dana desa selalu mendapat penilaian dan pemantauan setiap saat.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
4.	Pengawasan telah membuat perbaikan dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
5.	Pengawasan telah membuat adanya evaluasi perbandingan keuangan dana desa berdasarkan rencana yang diharapkan.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
6.	Pengawasan telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pengelolaan keuangan dana desa	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

7.	Pengawasan telah membuat pengelolaan keuangan desa terarah sesuai dengan apa yang dibutuhkan didalam desa.	1	2	3	4	5
JENIS PERTANYAAN						
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	Setuju	Sangat Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Kepala Desa telah memberikan perintah sesuai peraturan dalam melakukan semua kegiatan anggaran dana desa.	1	2	3	4	5
2.	Ketika ada pengelolaan keuangan desa tidak sesuai peraturan kepala desa memberikan teguran.	1	2	3	4	5
3.	Kepala desa selalu bersikap jujur dan berterus terang jika adanya kejanggalan yang menyimpang dari peraturan.	1	2	3	4	5
4.	Kepala desa selalu menerima saran dalam pengelolaan keuangan dana desa.	1	2	3	4	5
5.	Selalu mengutamakan kepentingan umum dalam membuat suatu keputusan sebagai amanat undang-undang.	1	2	3	4	5
6.	Kepala desa selalu mengutamakan sikap tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa.	1	2	3	4	5
7.	Kepala desa memberikan keputusan yang baik sesuai dengan hasil dari diskusi.	1	2	3	4	5
JENIS PERTANYAAN						
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	Setuju	Sangat Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Pengelolaan dana desa telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.	1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku tanpa adanya kepentingan sekelompok pihak untuk mendapatkan keuntungan.	1	2	3	4	5
3.	Penatausahaan yang telah direncanakan dapat memberi mamfaat dan dampak yang lebih besar dari jumlah anggaran yang dikeluarkan.	1	2	3	4	5
4.	Semua anggaran yang digunakan untuk operasional desa telah dipublikasi dan dilaporkan secara jelas.	1	2	3	4	5
5.	Laporan pertanggung jawaban dana desa selalu tepat waktu.	1	2	3	4	5

Lampiran 2. Data tabulasi kuesioner

NO	KARAKTERISTIK			PENGAWASAN INSPEKTORAT									KEPEMIMPINAN KEPALA DESA								PENGELOLAAN KEUANGAN DESA						
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	X1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	x2	D1	D2	D3	D4	D5	Y		
1	3	1	1	3	4	4	4	4	4	3	3.75	3	4	4	4	4	3	4	3.71	4	4	4	4	4	4.00		
2	4	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2.75	4	3	4	4	4	4	4	3.86	3	3	4	4	4	3.40		
3	4	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3.25	4	3	3	3	3	4	3	3.29	3	3	4	4	4	3.40		
4	3	2	3	4	4	4	5	5	4	3	4.25	5	4	4	4	5	5	4	4.43	3	4	5	3	3	3.60		
5	5	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4.00	3	2	2	2	2	4	2	2.43	4	4	3	3	3	3.40		
6	5	1	1	4	4	4	4	4	4	5	4.00	5	4	4	4	4	5	4	4.29	4	4	4	4	4	4.00		
7	4	1	1	3	5	5	3	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	3	4	4	4	3.80		
8	5	1	1	4	4	5	5	5	4	5	4.50	4	2	3	3	3	4	3	3.14	4	4	3	3	3	3.40		
9	5	1	3	3	3	3	3	4	3	5	3.00	3	3	4	3	4	3	4	3.43	4	3	3	3	3	3.20		
10	3	1	2	4	4	3	4	3	4	4	3.75	3	2	3	3	3	3	3	2.86	3	3	2	2	3	2.60		
11	4	1	3	4	4	5	5	5	4	5	4.50	5	4	4	4	5	5	4	4.43	5	5	5	4	5	4.80		
12	5	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	3	4	4	4	4	4	3.86	4	4	3	3	4	3.60		
13	6	1	1	4	4	3	4	4	4	4	3.75	5	3	4	3	4	5	4	4.00	4	3	3	3	4	3.40		
14	4	2	1	4	4	5	5	5	4	5	4.50	5	3	4	3	5	5	4	4.14	4	4	4	4	4	4.00		
15	4	1	3	4	4	5	4	5	4	5	4.25	5	4	4	4	5	5	5	4.57	5	5	5	4	5	4.80		
16	5	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	3	4	4	5	4	5	4.14	4	5	5	4	4	4.40		
17	4	1	1	4	4	3	4	4	4	4	3.75	3	3	4	3	4	3	4	3.43	4	4	3	3	3	3.40		
18	6	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4.00	3	2	3	3	3	4	3	3.00	4	4	3	3	3	3.40		
19	3	1	3	4	4	3	4	4	4	4	3.75	3	4	4	4	4	3	4	3.71	4	3	4	4	4	3.80		
20	3	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	3	4	3	4	4	4	3.71	3	5	4	4	4	4.00		
21	3	1	3	4	4	3	5	4	4	5	4.00	3	3	4	3	4	3	5	3.57	3	4	4	4	4	3.80		
22	6	1	1	4	4	4	5	4	4	4	4.25	4	3	4	4	4	4	4	3.86	3	4	5	3	3	3.60		
23	6	2	2	4	4	5	5	4	4	5	4.50	3	3	2	3	3	3	2	2.71	4	4	3	3	3	3.40		
24	3	1	3	4	4	5	5	4	4	5	4.50	3	2	2	2	3	4	2	2.57	4	4	4	4	4	4.00		
25	4	1	3	2	3	3	4	4	3	2	3.00	3	4	4	3	4	3	4	3.57	4	5	4	4	4	4.20		
26	4	1	2	3	3	3	4	4	3	3	3.25	4	3	3	4	3	4	3	3.43	4	4	3	3	4	3.60		
27	3	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3.50	5	2	3	2	4	5	3	3.43	4	4	3	3	4	3.60		
28	5	1	3	4	4	3	5	4	4	3	4.00	3	2	2	3	2	3	2	2.43	4	3	3	3	4	3.40		
29	4	1	2	3	3	3	2	3	3	3	2.75	3	2	3	3	3	3	3	2.86	3	3	2	2	3	2.60		
30	4	1	2	4	4	5	5	5	4	5	4.50	5	3	4	4	4	5	4	4.14	5	5	5	4	5	4.80		
31	5	1	3	4	3	3	4	4	4	5	3.50	3	2	3	2	3	4	3	2.86	4	4	3	3	4	3.60		
32	3	1	2	4	4	3	4	4	4	5	3.75	5	3	4	3	5	5	4	4.14	4	3	3	3	4	3.40		
33	5	1	2	4	4	5	5	4	4	5	4.50	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00		
34	3	1	2	4	4	5	4	4	4	4	4.25	4	4	4	4	5	4	5	4.29	5	4	5	4	5	4.60		
35	4	1	2	4	4	4	5	4	4	5	4.25	3	3	3	4	3	3	4	3.29	4	5	5	4	4	4.40		
36	5	1	3	4	4	5	4	5	4	3	4.25	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3.00		
37	4	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4.00	3	3	4	4	4	4	4	3.71	4	3	4	4	4	3.80		
38	4	1	2	4	4	5	5	3	4	5	4.50	3	3	4	4	4	3	4	3.57	3	4	4	4	3	3.60		
39	6	1	1	4	3	3	4	4	4	3	3.50	3	3	2	3	2	3	2	2.57	4	4	3	3	3	3.40		
40	3	1	2	4	3	3	4	4	4	4	3.50	5	3	4	4	4	5	4	4.14	4	4	4	4	4	4.00		
41	3	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00		
42	3	1	2	3	3	3	5	4	3	3	3.50	3	3	3	3	3	3	3	3.00	4	4	3	3	3	3.40		
43	4	1	3	4	4	3	4	4	4	4	3.75	4	3	4	3	4	4	4	3.71	4	4	3	3	3	3.40		
44	6	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3.00	3	3	2	3	2	3	2	2.57	2	3	2	2	2	2.20		

Frequencies

Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	36-40 Tahun	13	29.5	29.5	29.5
	41-45 Tahun	15	34.1	34.1	63.6
	46-50 Tahun	10	22.7	22.7	86.4
	>50 tahun	6	13.6	13.6	100.0
Total		44	100.0	100.0	

Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	39	88.6	88.6	88.6
	Perempuan	5	11.4	11.4	100.0
Total		44	100.0	100.0	

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	13	29.5	29.5	29.5
	Diploma	17	38.6	38.6	68.2
	Sarjana	14	31.8	31.8	100.0
Total		44	100.0	100.0	

Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan dana desa di dukung oleh ukuran dan standar kerja yang telah di rencanakan secara berkualitas.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	2	4.5	4.5	4.5
	Krg Setuju	9	20.5	20.5	25.0
	Setuju	33	75.0	75.0	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dana desa tepat waktu.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Krg Setuju	12	27.3	27.3	27.3
Setuju	31	70.5	70.5	97.7
Sgt Setuju	1	2.3	2.3	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Pengawasan Inspektorat telah membuat seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dana desa selalu mendapat penilaian dan pemantauan setiap saat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Krg Setuju	19	43.2	43.2	43.2
Setuju	13	29.5	29.5	72.7
Sgt Setuju	12	27.3	27.3	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Pengawasan telah membuat perbaikan dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tdk Setuju	1	2.3	2.3	2.3
Krg Setuju	4	9.1	9.1	11.4
Setuju	25	56.8	56.8	68.2
Sgt Setuju	14	31.8	31.8	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Pengawasan telah membuat adanya evaluasi perbandingan keuangan dana desa berdasarkan rencana yang diharapkan.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Krg Setuju	5	11.4	11.4	11.4
Setuju	32	72.7	72.7	84.1
Sgt Setuju	7	15.9	15.9	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Pengawasan telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pengelolaan keuangan dana desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Krg Setuju	9	20.5	20.5	20.5
Setuju	35	79.5	79.5	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Pengawasan telah membuat pengelolaan keuangan desa terarah sesuai dengan apa yang dibutuhkan didalam desa.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tdk Setuju	2	4.5	4.5	4.5
Krg Setuju	11	25.0	25.0	29.5
Setuju	16	36.4	36.4	65.9
Sgt Setuju	15	34.1	34.1	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Kepala Desa telah memberikan perintah sesuai peraturan dalam melakukan semua kegiatan anggaran dana desa.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Krg Setuju	21	47.7	47.7	47.7
Setuju	13	29.5	29.5	77.3
Sgt Setuju	10	22.7	22.7	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Ketika ada pengelolaan keuangan desa tidak sesuai peraturan kepala desa memberikan teguran.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tdk Setuju	9	20.5	20.5	20.5
Krg Setuju	24	54.5	54.5	75.0
Setuju	11	25.0	25.0	100.0
Total	44	100.0	100.0	

Kepala desa selalu bersikap jujur dan berterus terang jika adanya kejanggalanyang menyimpang dari peraturan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	6	13.6	13.6	13.6
	Krg Setuju	11	25.0	25.0	38.6
	Setuju	27	61.4	61.4	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Kepala desa selalu menerima saran dalam pengelolaan keuangan dana desa.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	4	9.1	9.1	9.1
	Krg Setuju	20	45.5	45.5	54.5
	Setuju	20	45.5	45.5	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Selalu mengutamakan kepentingan umum dalam membuat suatu keputusansebagai amanat undang-undang.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	4	9.1	9.1	9.1
	Krg Setuju	12	27.3	27.3	36.4
	Setuju	21	47.7	47.7	84.1
	Sgt Setuju	7	15.9	15.9	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Kepala desa selalu mengutamakan sikap tanggung jawab terhadappengelolaaan keuangan desa.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	16	36.4	36.4	36.4
	Setuju	18	40.9	40.9	77.3
	Sgt Setuju	10	22.7	22.7	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Kepala desa memberikan keputusan yang baik sesuai dengan hasil daridiskusi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	6	13.6	13.6	13.6
	Krg Setuju	10	22.7	22.7	36.4
	Setuju	24	54.5	54.5	90.9
	Sgt Setuju	4	9.1	9.1	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Pengelolaan dana desa telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	1	2.3	2.3	2.3
	Krg Setuju	10	22.7	22.7	25.0
	Setuju	29	65.9	65.9	90.9
	Sgt Setuju	4	9.1	9.1	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku tanpa adanya kepentingan sekelompok pihak untuk mendapatkankeuntungan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	13	29.5	29.5	29.5
	Setuju	24	54.5	54.5	84.1
	Sgt Setuju	7	15.9	15.9	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Penatausahaan yang telah direncanakan dapat memberi mamfaat dan dampakyang lebih besar dari jumlah anggaran yang dikeluarkan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	3	6.8	6.8	6.8
	Krg Setuju	17	38.6	38.6	45.5
	Setuju	16	36.4	36.4	81.8
	Sgt Setuju	8	18.2	18.2	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Semua anggaran yang digunakan untuk operasional desa telah dipublikasi dan dilaporkan secara jelas.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	3	6.8	6.8	6.8
	Krg Setuju	19	43.2	43.2	50.0
	Setuju	22	50.0	50.0	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Laporan pertanggung jawaban dana desa selalu tepat waktu.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	1	2.3	2.3	2.3
	Krg Setuju	17	38.6	38.6	40.9
	Setuju	22	50.0	50.0	90.9
	Sgt Setuju	4	9.1	9.1	100.0
Total		44	100.0	100.0	

Correlations

Correlations								
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	X1
A1 Pearson Correlation	1	.920*	.487*	.315	.638*	.433	.316	.762*
Sig. (2-tailed)		.000	.001	.035	.000	.003	.034	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
A2 Pearson Correlation	.920**	1	.378*	.146	.553**	.319*	.160	.651**
Sig. (2-tailed)	.000		.010	.339	.000	.033	.293	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
A3 Pearson Correlation	.487**	.378*	1	.608**	.869**	.928**	.608**	.890**
Sig. (2-tailed)	.001	.010		.000	.000	.000	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
A4 Pearson Correlation	.315*	.146	.608**	1	.583**	.598**	.696**	.698**
Sig. (2-tailed)	.035	.339	.000		.000	.000	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
A5 Pearson Correlation	.638**	.553**	.869**	.583**	1	.865**	.498**	.921**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.001	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
A6 Pearson Correlation	.433**	.319*	.928**	.598**	.865**	1	.620**	.870**
Sig. (2-tailed)	.003	.033	.000	.000	.000		.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
A7 Pearson Correlation	.316*	.160	.608**	.696**	.498**	.620**	1	.687**
Sig. (2-tailed)	.034	.293	.000	.000	.001	.000		.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
X1 Pearson Correlation	.762**	.651**	.890**	.698**	.921**	.870**	.687**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	44	44	44	44	44	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations								
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	X2
B1 Pearson Correlation		.399**	.330*	.420**	.465**	.511**	.360*	.644**
Sig. (2-tailed)		.007	.027	.004	.001	.000	.015	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
B2 Pearson Correlation	.399**		.672**	.863**	.531**	.368*	.599**	.806**
Sig. (2-tailed)	.007		.000	.000	.000	.013	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
B3 Pearson Correlation	.330*	.672**		.593**	.439**	.484**	.501**	.790**
Sig. (2-tailed)	.027	.000		.000	.003	.001	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
B4 Pearson Correlation	.420**	.863**	.593**		.502**	.468**	.800**	.831**
Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000		.000	.001	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
B5 Pearson Correlation	.465**	.531**	.439**	.502**		.434**	.381**	.715**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.003	.000		.003	.010	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
B6 Pearson Correlation	.511**	.368*	.484**	.468**	.434**		.598**	.756**
Sig. (2-tailed)	.000	.013	.001	.001	.003		.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
B7 Pearson Correlation	.360*	.599**	.501**	.800**	.381**	.598**		.765**
Sig. (2-tailed)	.015	.000	.000	.000	.010	.000		.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44
X2 Pearson Correlation	.644**	.806**	.790**	.831**	.715**	.756**	.765**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	44	44	44	44	44	44	44	44

**.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	C1	C2	C3	C4	C5	Y
C1 Pearson Correlation		.465**	.373*	.398**	.738**	.724**
Sig. (2-tailed)		.001	.012	.007	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44
C2 Pearson Correlation	.465**		.572**	.433**	.473**	.753**
Sig. (2-tailed)	.001		.000	.003	.001	.000
N	44	44	44	44	44	44
C3 Pearson Correlation	.373*	.572**		.801**	.598**	.841**
Sig. (2-tailed)	.012	.000		.000	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44
C4 Pearson Correlation	.398**	.433**	.801**		.633**	.794**
Sig. (2-tailed)	.007	.003	.000		.000	.000
N	44	44	44	44	44	44
C5 Pearson Correlation	.738**	.473**	.598**	.633**		.843**
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
N	44	44	44	44	44	44
Y Pearson Correlation	.724**	.753**	.841**	.794**	.843**	
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	44	44	44	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5. Hasil uji reliabilitas

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	44	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.844	.869	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3.7045	.55320	44
A2	3.7500	.48823	44
A3	3.8409	.83369	44
A4	4.1818	.69123	44
A5	4.0455	.52627	44
A6	3.7955	.40803	44
A7	4.0000	.88921	44

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.903	3.705	4.182	.477	1.129	.031	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	23.6136	8.103	.723	.818	.808
A2	23.5682	8.530	.673	.722	.818
A3	23.4773	7.279	.603	.523	.828
A4	23.1364	8.027	.557	.355	.830
A5	23.2727	8.854	.497	.325	.838
A6	23.5227	8.674	.768	.867	.815
A7	23.3182	6.920	.636	.513	.825

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	44	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.895	.894	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3.7500	.81054	44
B2	3.0455	.68044	44
B3	3.4773	.73100	44
B4	3.3636	.65026	44
B5	3.7045	.85125	44
B6	3.8636	.76526	44
B7	3.5909	.84408	44

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.542	3.045	3.864	.818	1.269	.076	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	21.0455	13.114	.654	.885	.885
B2	21.7500	14.052	.606	.598	.889
B3	21.3182	12.687	.842	.880	.863
B4	21.4318	14.298	.587	.594	.891
B5	21.0909	11.759	.878	.863	.856
B6	20.9318	14.065	.515	.874	.900
B7	21.2045	12.166	.803	.892	.866

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	44	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	44	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.851	.854	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3.8182	.62030	44
C2	3.8636	.66790	44
C3	3.6591	.86113	44
C4	3.4318	.62497	44
C5	3.6591	.68005	44

Summary Item Statistics

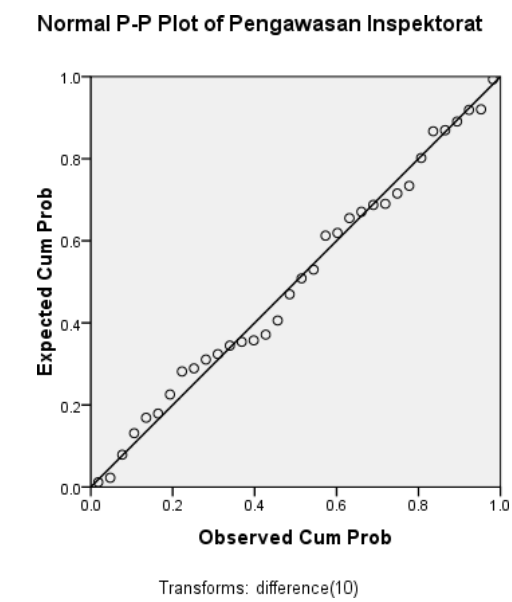
	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.686	3.432	3.864	.432	1.126	.029	5

Item-Total Statistics

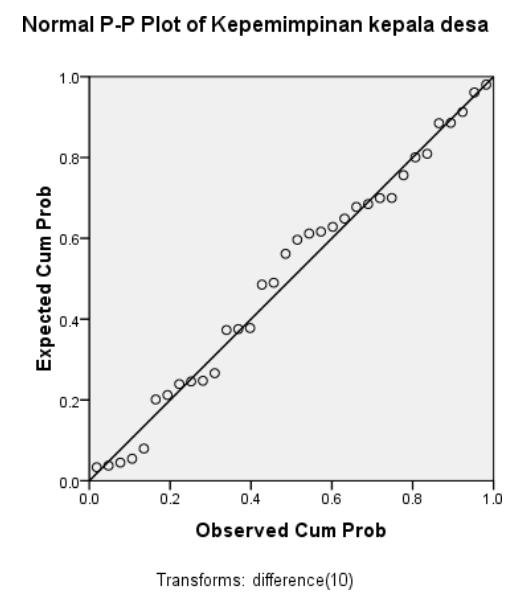
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	14.6136	5.545	.572	.574	.843
C2	14.5682	5.367	.577	.394	.842
C3	14.7727	4.273	.726	.709	.808
C4	15.0000	5.163	.721	.680	.808
C5	14.7727	4.877	.752	.685	.797

PPlot

Pengawasan Inspektorat

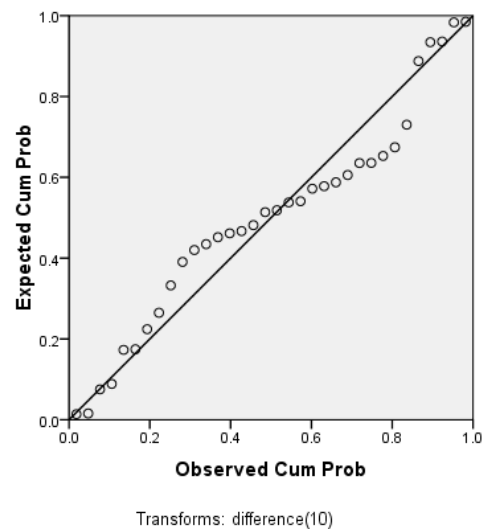


Kepemimpinan kepala desa



Pengelolaan keuangan dana desa

Normal P-P Plot of Pengelolaan keuangan dana desa



Regression

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kemampuan fisik , Kemampuan intelektual ^a		.Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Produktivitas kerja

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.579	.559	.37106

- a. Predictors: (Constant), Kemampuan fisik , Kemampuan intelektual
- b. Dependent Variable: Produktivitas kerja

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	7.967	2	3.984	.000 ^a
	Residual	5.783	41	.141	
	Total	13.750	43		

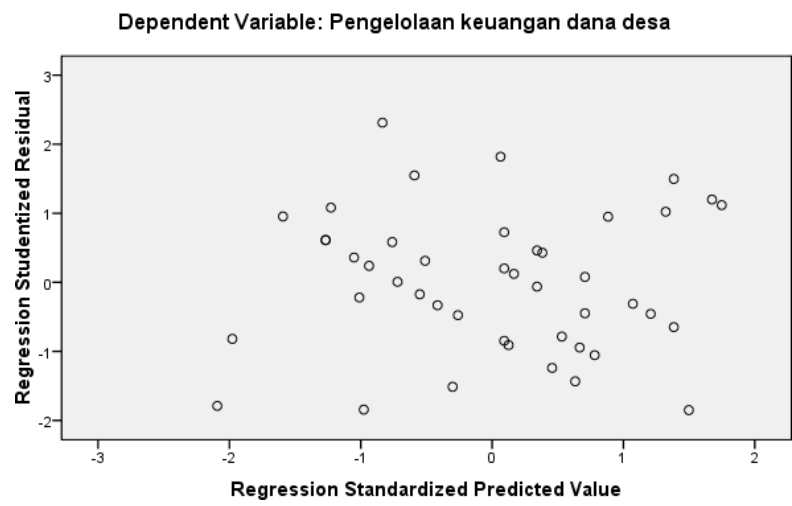
- a. Predictors: (Constant), Kemampuan fisik , Kemampuan intelektual
- b. Dependent Variable: Produktivitas kerja

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.160	.495		.323	.748		
Kemampuan intelektual	.476	.099	.509	4.812	.000	.895	1.117
Kemampuan fisik	.494	.123	.425	4.015	.000	.895	1.117

- a. Dependent Variable: Produktivitas kerja

Charts

Scatterplot



Lampiran 8. TABEL STATISTIK

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.955	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	55	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.555	42	0.304	0.393	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	550	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			

f	0.1	0.05	0.02	0.01
1	6.314	12.706	31.821	63.657
2	2.92	4.303	6.965	9.925
3	2.353	3.182	4.541	5.841
4	2.132	2.776	3.747	4.604
5	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.86	2.306	2.896	3.355
9	1.833	2.262	2.821	3.25
10	1.812	2.228	2.764	3.169
30	1.697	2.042	2.457	2.75
31	1.696	2.04	2.453	2.744
32	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.69	2.03	2.438	2.724
36	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.687	2.026	2.431	2.715
38	1.686	2.024	2.429	2.712
39	1.685	2.023	2.426	2.708
40	1.684	2.021	2.423	2.704
41	1.683	2.02	2.421	2.701
42	1.682	2.018	2.418	2.698
43	1.681	2.017	2.416	2.695
44	1.68	2.015	2.414	2.692
45	1.679	2.014	2.412	2.69
46	1.679	2.013	2.41	2.687
47	1.678	2.012	2.408	2.685
48	1.677	2.011	2.407	2.682
49	1.677	2.01	2.405	2.68
50	1.676	2.009	2.403	2.678

df2\df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81
2	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00
3	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77
4	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10
5	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68
6	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39
7	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18
8	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02
9	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90
10	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80
11	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71
12	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65
13	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59
14	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54
15	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49
16	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46
17	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42
18	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39
19	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34
20	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30
22	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27
24	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24
26	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21
28	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16
30	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12
35	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10
40	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07
45	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04
50	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02